

**ANALISIS DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH DI
KOTA GORONTALO (PERIODE 2006-2013)**

Verawaty Abdullah, Imran R. Hambali, Hj. Valentina Monoarfa

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Perdebatan tentang pentingnya Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang defisit anggaran dalam APBD yang melanda Kota Gorontalo masih terjadi. Dimana Pendapatan lebih rendah dari pada belanja. Konsekuensinya dalam mengupayakan pembangunan di Kota Gorontalo masih belum optimal. Karena untuk pembangunan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Terkait dengan hal ini, pemerintah daerah mencari alternatif untuk membiayai defisit anggaran pemerintah dengan cara mengadakan pinjaman daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat trend defisit anggaran pemerintah daerah, trend pinjaman pemerintah daerah dan dampak defisit anggaran pemerintah daerah terhadap pinjaman pemerintah daerah periode 2006-2013 yang diperoleh dari APBD Kota Gorontalo. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis trend linear dan regresi sederhana. Hasil penelitiannya menunjukkan dimana untuk defisit anggaran pemerintah daerah dan pinjaman pemerintah daerah menunjukkan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dan untuk hasil penelitian dari dampak defisit anggaran pemerintah daerah terhadap pinjaman pemerintah menunjukkan pengaruh yang signifikan dari jumlah defisit anggaran pemerintah terhadap jumlah pinjaman pemerintah daerah. Dimana Semakin besar jumlah defisit anggaran pemerintah maka jumlah pinjaman pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

**Kata Kunci: Defisit Anggaran Pemerintah Daerah dan Pinjaman
Pemerintah Daerah.**

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukanya otonomi daerah, keseluruhan daerah berlomba-lomba mengoptimalkan daya saing potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana prinsip dari otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Darise, 2009:3).

Pencapaian tujuan dari otonomi daerah tentu memerlukan sebuah *resource* sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah yang dikelola dengan baik. Salah satu *resource* sumber daya tersebut adalah menyangkut keuangan suatu daerah. Dalam hal ini bagaimana keuangan yang terima dari rakyat. Sehingga berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengatur keuangan yang baik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK.

Pemerintah telah mencanangkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Government*), yang terdiri dari tiga pilar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Tiga pilar tersebut menyangkut bagaimana suatu daerah dapat mengakomodir keinginan masyarakat. Akan tetapi hampir disetiap daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan ketiga pilar utama tersebut. Fakta yang terjadi pengelolaan keuangan daerah menimbulkan banyak masalah. Diantaranya masalah tentang efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan keuangan yang kurang baik dan banyak sekali ditemukan masalah tentang defisit anggaran pemerintah daerah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu saja timbul kontroversi tentang defisit yang terjadi pada anggaran pemerintah daerah. Sehingga cukup memperoleh perhatian dari masyarakat dan akhirnya masyarakat terbawa ke dalam debat publik yang berkepanjangan.

Dalam rangka pembiayaan defisit anggaran, diperlukan adanya sumber pembiayaan. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan untuk menutup defisit mencakup sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA), Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Piutang Daerah) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Darise, 2009: 129).

Salah satu sumber penerimaan pembiayaan yang telah disebutkan diatas adalah pinjaman daerah. UU No. 33/2004 menyebutkan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Kuncoro, 2012: 348). Berkenan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Gorontalo mengadakan pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada bulan november tahun 2012 sebesar Rp. 35 Miliar untuk tahun anggaran 2013.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis menarik sebuah judul untuk penelitian yaitu “Analisis Defisit Anggaran Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pinjaman Pemerintah Daerah Di Kota Gorontalo (Periode 2006 – 2013)”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana trend defisit anggaran pemerintah daerah dan trend pinjaman pemerintah daerah di Kota Gorontalo (periode 2006 –2013) dan apakah defisit anggaran pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pinjaman pemerintah daerah di Kota Gorontalo (Periode 2006 – 2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui trend defisit anggaran pemerintah daerah dan untuk mengetahui trend pinjaman pemerintah daerah di Kota Gorontalo (periode 2006 – 2013). untuk mengetahui defisit anggaran pemerintah daerah memberikan dampak terhadap pinjaman pemerintah daerah di Kota Gorontalo (Periode 2006 – 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2010 : 193) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain

atau mencari melalui dokumen. Data yang dipilih adalah data pada kurun waktu tahun 2006 sampai 2013 dalam bentuk tahunan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta menambahkan data dari internet (<http://www.djpk.go.id>. Diakses, 5 Juli 2013).

Metode Analisis

Model dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis trend linear dan regresi sederhana. Suatu model regresi linear sederhana dengan hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = a + b X$$

y_t : Nilai trend untuk setiap unit x

x : Unit waktu tertentu

a : *intercept* (nilai trend y_t pada saat $x = 0$)

b : Koefisien trend: penambahan y untuk setiap unit waktu tertentu.

Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik yang dibangun oleh peneliti yaitu semakin besar defisit anggaran pemerintah daerah semakin besar pula pinjaman pemerintah daerah.

Uji Normalitas

Salah satu syarat dalam melakukan analisis regresi adalah data dari variabel dependen (Y) yang diamati harus berdistribusi normal. Untuk itu sebelum dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk mengetahui normalitas data yang diamati.

Analisis Regresi

Setelah persyaratan normalitas data telah dipenuhi maka dilakukan analisis regresi untuk mengetahui bagaimana pengaruh defisit anggaran pemerintah daerah terhadap jumlah pinjaman pemerintah daerah. Karena jumlah variabel bebas (X)

yang dianalisis hanya satu maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.

Pengujian Model Regresi

Sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan, model regresi yang diperoleh terlebih dahulu harus diuji kebaikannya (*goodness of fit*). Tahapan pengujian kebaikan model regresi adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Hipotesis

Ho : seluruh koefisien regresi tidak signifikan (model regresi tidak signifikan)

H1 : minimal satu koefisien regresi signifikan (model regresi signifikan)

2. Penentuan tingkat signifikansi

Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signifikansinya (α) sebesar 5%

3. Penentuan Statistik Uji

Dalam melakukan uji kebaikan model digunakan uji F.

4. Penentuan Kriteria uji

Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai F-hitung yang diperoleh dengan F-tabel. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel maka Ho ditolak, dan jika nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel maka Ho diterima

5. Kesimpulan

Pengujian Hipotesis

Setelah pengujian model dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian signifikansi pengaruh dari variabel X (defisit anggaran) terhadap jumlah pinjaman pemerintah. Adapun pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Hipotesis

Ho : tidak terdapat pengaruh dari jumlah defisit anggaran terhadap jumlah pinjaman daerah Kota Gorontalo

H1 : terdapat pengaruh dari jumlah defisit anggaran terhadap jumlah pinjaman daerah Kota Gorontalo

2. Penentuan tingkat signifikansi

Tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% atau dengan kata lain tingkat signifikansinya (α) sebesar 5%.

3. Penentuan Statistik Uji

Dalam melakukan uji signifikansi pengaruh dalam model regresi akan digunakan uji t.

4. Penentuan Kriteria uji

Penentuan kriteria uji didasarkan pada perbandingan antara nilai t-hitung yang diperoleh dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H_0 ditolak, dan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka H_0 diterima.

5. Kesimpulan

Interpretasi Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu maka model yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Pinjaman Pemerintah |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| N | | 17 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 7445.3047 |
| | Std. Deviation | 3960.44279 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .147 |
| | Positive | .118 |
| | Negative | -.147 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .605 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .857 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil analisis diatas diperoleh nilai koefisien Kolmogorov Smirnov (KS) untuk variabel Pinjaman Pemerintah sebesar 0,605 dengan nilai signifikansi sebesar 0,857. Adapun nilai Z-tabel pada tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 1,96. Jika nilai KS yang diperoleh dibandingkan dengan nilai Z-tabel maka nilai KS jauh lebih kecil dari nilai Z-tabel sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data jumlah pinjaman pemerintah Kota Gorontalo yang dianalisis telah berdistribusi normal.

Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut :

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4370.562 | 1394.974 | | 3.133 | .007 |
| | Defisit APBD | -.560 | .206 | -.574 | -2.712 | .016 |

a. Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis diatas maka model regresi antara jumlah defisit (X) dengan jumlah pinjaman daerah (Y) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 4370,56 - 0,560X$$

Dari model regresi diatas dapat ditafsirkan beberapa hal berikut :

- ❖ Rata-rata jumlah pinjaman daerah Kota Gorontalo selama periode 2008-2009 dan 2011-2013 adalah sebesar 4370,56 juta rupiah atau sekitar 4,37 milyar rupiah per triwulan. Atau dengan kata lain rata-rata jumlah pinjaman daerah per tahun sekitar 17,48 milyar rupiah.
- ❖ Penafsiran makna koefisien regresi untuk variabel defisit harus dilakukan berlawanan dengan tanda koefisien yang diperoleh agar kesimpulan yang diperoleh tidak salah. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan bentuk data variabel defisit yang bertanda negatif. Dengan demikian tanda koefisien regresi variabel X sebesar -0,56 dapat ditafsirkan bahwa setiap peningkatan jumlah defisit anggaran sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan peningkatan jumlah pinjaman pemerintah daerah sebesar 0,56 milyar rupiah. Untuk sisanya sebesar 0,44 milyar rupiah, berasal dari SILPA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dana Cadangan dan Penerimaan Piutang.

Pengujian Model Regresi

Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 82561448 | 1 | 82561447.81 | 7.354 | .016 ^a |
| | Residual | 2E+008 | 15 | 11226684.35 | | |
| | Total | 3E+008 | 16 | | | |

a. Predictors: (Constant), Defisit APBD

b. Dependent Variable: Pinjaman Pemerintah

Dari hasil analisis sebelumnya diperoleh nilai F-hitung sebesar 7,35 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan yakni 5% sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dianalisis telah fit dengan data. Atau dengan kata lain model analisis regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk

menjelaskan bentuk pengaruh defisit anggaran pemerintah terhadap jumlah pinjaman pemerintah.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil analisis sebelumnya diketahui nilai mutlak t-hitung untuk variabel defisit anggaran adalah sebesar 2,712 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan (0,05) sehingga H_0 ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah defisit anggaran pemerintah terhadap jumlah pinjaman pemerintah daerah. Semakin besar jumlah defisit anggaran pemerintah maka jumlah pinjaman pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

Interpretasi Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi untuk model regresi antara defisit anggaran pemerintah daerah dengan pinjaman pemerintah daerah yang diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut :

Model Summary

| | Model |
|----------------------------|-------------------|
| | 1 |
| R | .574 ^a |
| R Square | .329 |
| Adjusted R Square | .284 |
| Std. Error of the Estimate | 3350.624 |

a. Predictors: (Constant), Defisit APBD

Hasil analisis diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R-Square) untuk model pengaruh jumlah defisit terhadap jumlah pinjaman adalah sebesar 0,329. Ini berarti bahwa 32,9% variasi perubahan jumlah pinjaman pemerintah daerah Kota Gorontalo selama periode 2008-2009 dan 2011-2013 dipengaruhi oleh defisit anggaran pemerintah. Adapun sisanya sebesar 67,1% variasi jumlah pinjaman pemerintah dipengaruhi oleh variabel/faktor lain selain jumlah defisit

anggaran yang ada seperti pengeluaran pemerintah, dan faktor lainnya yang berhubungan dengan pengaruh defisit anggaran pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Analisis Defisit Anggaran Pemerintah Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pinjaman Pemerintah Daerah Di Kota Gorontalo

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa defisit masih terjadi di hampir semua tahun anggaran yang diamati. Terjadinya defisit anggaran ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah belanja pemerintah dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Meskipun dari hasil analisis trend yang dilakukan menunjukkan adanya trend peningkatan baik untuk pendapatan maupun belanja daerah namun pertumbuhan belanja daerah jauh lebih besar pertumbuhan anggaran. Hal inilah yang menyebabkan defisit anggaran pemerintah daerah Kota Gorontalo.

Terjadinya defisit anggaran ini menunjukkan manajemen pengelolaan APBD Daerah Kota Gorontalo belum berjalan optimal. Defisit anggaran ini sebenarnya dapat diatasi jika seandainya pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah seperti dari pajak daerah, retribusi ataupun dari sumber-sumber lain. Namun data yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut belum begitu baik sehingga pemanfaatannya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara PAD dan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kota Gorontalo.

**Tabel 4: Jumlah Anggaran PAD dan Dana Perimbangan Kota Gorontalo
Periode 2006 – 2013**

| Tahun | PAD | | Dana Perimbangan | | Total |
|--------------|---------------|----------|-------------------------|----------|--------------|
| | Jumlah | % | Jumlah | % | |
| 2006 | 26,228.43 | 9.83% | 240,470.96 | 90.17% | 266,699.39 |
| 2007 | 35,053.38 | 11.04% | 282,542.67 | 88.96% | 317,596.05 |
| 2008 | 45,995.09 | 12.61% | 318,813.53 | 87.39% | 364,808.62 |

| | | | | | |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 2009 | 53,590.52 | 13.79% | 335,039.97 | 86.21% | 388,630.49 |
| 2010 | 62,314.82 | 16.59% | 313,332.02 | 83.41% | 375,646.84 |
| 2011 | 31,636.44 | 8.40% | 344,923.79 | 91.60% | 376,560.23 |
| 2012 | 84,349.04 | 16.68% | 421,263.00 | 83.32% | 505,612.04 |
| 2013 | 134,378.00 | 22.10% | 473,739.00 | 77.90% | 608,117.00 |

Dari data diatas terlihat bahwa sepanjang tahun 2006-2013, kontribusi PAD Kota Gorontalo terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil yakni dibawah 20%. Mayoritas pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yang notabene berasal dari pemerintah pusat. Data ini menunjukkan masih sangat rendahnya kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2013 terjadi perbaikan meskipun tidak secara signifikan. Ini terlihat dari peningkatan kontribusi PAD menjadi 22,1% dari total pendapatan. Kedepan hal ini perlu ditingkatkan lagi agar pemerintah daerah tidak perlu lagi bergantung kepada pemerintah pusat terutama dalam membiayai pembangunan yang ada didaerah.

Defisit anggaran disebabkan adanya *budgeting slack* yaitu kecenderungan *stackholder* dalam menaikkan biaya dari pada pendapatan. Sehingga pemerintah mencari alternatif pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi. Sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut diantaranya dari SILPA, penggunaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman serta penerimaan piutang. Dari hasil studi yang telah dilakukan, dalam APBD Kota Gorontalo, sumber pembiayaan yang paling banyak dan hampir setiap tahun digunakan adalah penerimaan pinjaman.

Pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Jika ditinjau lebih dalam jumlah pinjaman pemerintah Kota Gorontalo selama tahun 2006-2013 memperlihatkan trend peningkatan dari tahun

ke tahun. Akan tetapi Fenomena ini sempat berubah pada tahun 2010 dimana jumlah pinjaman pemerintah Kota Gorontalo justru menjadi negatif sebesar -28,03 milyar. Ini mengisyaratkan bahwa pada tahun 2010 tersebut pemerintah Kota Gorontalo melakukan pembayaran pinjaman tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2010 anggaran pemerintah daerah Kota Gorontalo berada dalam posisi surplus.

Defisit anggaran Kota Gorontalo memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan pinjaman Kota Gorontalo. Untuk mengetahui dampak defisit anggaran pemerintah daerah terhadap pinjaman daerah, digunakan APBD dari tahun 2008, 2009, 2011, 2012 dan 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil analisis yang diperoleh bahwa nilai F-hitung sebesar 7,35 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan yakni 5% sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dianalisis telah fit dengan data. Atau dengan kata lain model analisis regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan dampak defisit anggaran pemerintah terhadap jumlah pinjaman pemerintah.

Dengan demikian hipotesis yang dibangun terbukti, yakni semakin besar jumlah defisit anggaran pemerintah maka jumlah pinjaman pemerintah daerah juga akan semakin meningkat. Setiap peningkatan jumlah defisit anggaran sebesar 1 Milyar akan di ikuti dengan peningkatan jumlah pinjaman pemerintah daerah sebesar 0,56 Milyar. Untuk sisanya sebesar 0,44 milyar rupiah, berasal dari SILPA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dana Cadangan dan Penerimaan Piutang.

Hasil peneliitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kunarjo, (1997, dalam penelitian Pamuji, 2008: 57) yang menunjukkan bahwa Semakin besar defisit maka semakin besar tingkat utang dan semakin besar pula pembayaran cicilan utang luar negeri. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam bukunya Darise (2009: 129) menekankan bahwa dalam

hal APBD diperkirakan defisit dapat didanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa: a) Jumlah defisit anggaran pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan trend yang berfluktuatif dari tahun ke tahun, Dimana APBD Kota Gorontalo di tahun 2006 sebesar -12.083 milyar rupiah, untuk tahun 2007 mengalami peningkatan defisit sebesar -112,45 milyar rupiah dan tahun 2008 menunjukkan penurunan defisit sebesar -50,708 milyar rupiah, untuk tahun-tahun selanjutnya sering berfluktuasi. b) Secara umum jumlah pinjaman daerah Kota Gorontalo cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan terdapat trend peningkatan jumlah pinjaman dari tahun ke tahun. c) Defisit anggaran Kota Gorontalo memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan pinjaman Kota Gorontalo. Untuk mengetahui dampak defisit anggaran pemerintah daerah terhadap pinjaman daerah, digunakan APBD dari tahun 2008, 2009, 2011, 2012 dan 2013. Dimana setiap peningkatan jumlah defisit anggaran sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan peningkatan jumlah pinjaman pemerintah daerah sebesar 0,56 milyar rupiah. Untuk sisanya sebesar 0,44 milyar rupiah, berasal dari SILPA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dana Cadangan dan Penerimaan Piutang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka perlu diungkapkan beberapa saran sebagai berikut ; a) Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya lebih pendapatan, misalnya dengan cara mengintensifikasikan pendapatan khususnya untuk pendapatan asli daerah (PAD), lebih banyak mengeluarkan peraturan tentang tata cara pengelolaan PAD, dan mencari titik potensial daerah baik di pusat maupun di dalam dunia bisnis. b) Jika dilihat dari segi belanja, pemerintah Kota Gorontalo seharusnya lebih mengurangi pengeluaran (belanja), misalnya lebih

mengoptimalkan proses pengawasan belanja, lebih memfokuskan belanja untuk tujuan dan sasaran yang jelas bukan untuk tujuan menghabiskan pendapatan, lebih banyak mengupdate standar-standar yang berhubungan dengan biaya. c) Dalam hal pembiayaan defisit anggaran, seharusnya pemerintah lebih meningkatkan penggunaan dana cadangan, memperbanyak investasi pemerintah yang dapat menghasilkan deviden dan bunga. Mengingat pinjaman daerah sangat beresiko. pinjaman daerah sangat beresiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah (rangkuman 7 uu, 30 pp dan 15 permendagri)*. Jakarta: Indeks
- <http://wartaekonomi.co.id/berita6610/bangun-terminal-dungingi-pip-utangi-gorontalo-rp35-miliar.html>. 2012. Diakses, 10 Juni 2013.
- <http://www.djpk.go.id>. Diakses, 5 Juli 2013
- Kuncoro, Mudrajad. (2012). *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Pamuji, Teguh. (2008). *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia (Tahun 1993-2007)*. Tesis. Semarang. Universitas di Ponegoro
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 22 tentang pembiayaan daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang *pinjaman daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- (2013). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Gorontalo: UNG